

## **Adaptasi *European Framework* pada Politik Linguistik Didaktik Bahasa Prancis di Indonesia**

Merry Andriani  
13/357453/SSA/904  
*Weekly Forum* FIB-UGM, Kamis 20 April 2017

Sejak awal penyatuan Uni Eropa melalui *The Treaty of Paris* pada tahun 1952, hingga terbentuknya Uni Eropa secara resmi pada *The Treaty of Nice* di Prancis tahun 2000, ide penyatuan negara-negara Eropa ini dibarengi dengan pembentukan kerangka acuan referensi bersama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, bahasa, dan sebagainya. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, salah satu bukti konkrit Kerangka Referensi Bersama Eropa ini adalah dengan disepakatinya sejak tahun 2000, satu mata uang bersama yaitu Euro.

Pada bidang bahasa, di tahun 2001 referensi acuan bersama yang disepakati adalah sebuah kerangka acuan yang populer dalam Bahasa Prancis dengan sebutan CECR<sup>1</sup>, atau dalam Bahasa Inggris disebut CEFR (*Common European Framework of References for Language*). Kerangka referensi ini telah diadopsi sebagai acuan oleh 37 negara di Eropa dan luar Eropa (Jepang, Cina, Arab, Kanada). Maka sebutan CECR juga sangat beragam, kerangka acuan ini tersedia dalam 37 bahasa yang berbeda-beda. Namun naskah CECR ini sendiri belum tersedia dalam Bahasa Indonesia. Bahkan hingga hari ini sedikit sekali atau hampir tidak ditemukan artikel, literatur ataupun kajian akademis terkait tema ini

---

<sup>1</sup>Sumber : website European Council : [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1\\_fr.asp](http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp)

di Indonesia. Padahal kerangka acuan ini sejak tahun 2005 telah digunakan juga di Indonesia sebagai referensi penyusunan kurikulum didaktik Bahasa Prancis di semua institusi pendidikan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun perguruan tinggi.

Jika ditilik konteks kelahirannya, Kerangka acuan Eropa ini merupakan sebuah instrumen perwujudan konsep politik linguistik untuk menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat di Eropa yang mulai mengalami permasalahan dengan tingginya jumlah imigran. Dalam rekomendasi yang dihasilkan pada forum kementerian Eropa di Strasbourg tahun 2002, seperti yang dinyatakan Starkey (2002) bahwa politik linguistik Eropa memiliki dua aspek penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia yaitu multilingualisme pada tataran negara dan plurilingualisme pada tataran individu. Rekomendasi Strasbourg ini kemudian diterapkan di setiap negara-negara Eropa dengan mewajibkan pengajaran minimal 2 bahasa asing di semua institusi pendidikan. Dalam penyusunan materi pengajaran dan kurikulum bahasa asing ini, Council of Europe menyodorkan sebuah kerangka acuan yang disepakati bersama yaitu CECR yang berbentuk naskah setebal 196 halaman.

Pada naskah tersebut terdapat berbagai komponen linguistik, pragmatik dan sociolinguistik yang sangat detil berupa daftar kecakapan dan kemampuan yang harus dikuasai seseorang dalam belajar, mengajar dan mengevaluasi penguasaan sebuah bahasa. Ketiga elemen ini dianggap penting dalam membentuk pengguna bahasa sebagai aktor sosial yang memiliki berbagai peran dan tugas dalam masyarakat. Bahasa tidak lagi hanya sekedar ilmu tentang struktur dan tata bahasa, namun menjadi sebuah instrumen penting dalam proses

konstruksi sosial dan identitas individu. Secara eksplisit dalam kerangka acuan Eropa ini ditemukan serangkaian rekomendasi untuk membentuk *savoir* (pengetahuan), *savoir-faire* (kecakapan), dan *savoir-être* (kepribadian) yang diutamakan dalam bahasa dan budaya sasaran. Pengguna bahasa diarahkan untuk merelatifkan pandangannya terhadap perbedaan budaya asalnya dengan budaya yang dipelajarinya bersama bahasa. Demikian diharapkan dengan menguasai bahasa asing, seseorang juga akan lebih terbuka menerima budaya asing tersebut.

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia juga tanpa disadari menerapkan politik linguistik Eropa ini melalui didaktik Bahasa Prancis dengan manual yang diimpor langsung dari Prancis. Pengguna Bahasa Prancis di Indonesia juga dilatih untuk menguasai pengetahuan, kecakapan dan karakter yang sesuai dengan konteks Prancis seperti yang dianjurkan oleh Kerangka Acuan Eropa tersebut. Instrumen konstruksi masyarakat Eropa ini direspon dengan berbeda oleh penggunaannya di Perguruan Tinggi Indonesia. Seperti hipotesis yang dikemukakan oleh Stuart Hall pada model komunikasi *Encoding/Decoding* (1973) bahwa dalam siklus komunikasi yang tidak linear akan terdapat tiga jenis respon yaitu pesan diterima dan diadopsi seutuhnya, pesan hanya diterima sebagian saja, dan pesan tidak diterima sama sekali. Dalam penelitian ini, ketiga hipotesis ini ditemukan pada pengguna Bahasa Prancis yang menerima informasi melalui manual Bahasa Prancis sebagai pesan yang diurai dan dicerna kemudian diinternalisasi secara individual.